



KORAN / MAJALAH	SUBYEK		MAJALAH :		2013																										
	KOMPAS	POS KOTA	GATRA																												
	SEPUTAR INDONESIA	RAKYAT MERDEKA	TEMPO																												
	KORAN TEMPO	REPUBLIKA	INVESTOR INDONESIA																												
	INVESTOR DAILY	MEDIA INDONESIA	WARTA EKONOMI																												
	BISNIS INDONESIA	SUARA PEMBARUAN																													
<input checked="" type="checkbox"/> KONTAN	NERACA																														
HALAMAN	20																														
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULAN	JAN			PEB	MAR			APR			MEI		JUN	JUL			AGT			SEP			OKT			NOP			DES		

Revisi Aturan Jalan Tol Siap Terbit

JAKARTA. Dalam waktu dekat, pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/ 2005 tentang Jalan Tol. Salah satu poin penting dalam perubahan beleid ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jalan tol selain PT Jasa Marga Tbk.

Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum bilang, dengan perubahan PP ini, pemerintah bisa mengerjakan proyek jalan tol yang secara ekonomi layak namun secara finansial tidak. "PP ini sudah hampir final, sekarang sudah ada di Sekretaris Kabinet (Setkab), tinggal diundang sekali lagi oleh Setkab, sebelum diparaf Presiden," ujarnya, akhir pekan lalu.

Setelah perubahan PP itu diteken, Djoko bilang, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang menunjuk dan mengatur satu BUMN khusus jalan tol. Jadi, di satu sisi, PP ini diperbaiki, di sisi lain konsep penunjukan BUMN jalan tol juga berjalan. "Sejauh ini, BUMN yang diusulkan adalah PT Hutama Karya (HK)," tuturnya.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Ari Widiyantoro, menyatakan perusahaannya siap menjalankan mandat sebagai BUMN jalan tol. Hutama Karya sudah mengubah Anggaran Dasar untuk menunjang bisnis jalan tol. "Kami sudah membentuk tim pengelola jalan tol dan menambah direktorat baru, yakni direktorat

pengembangan yang akan membawahi pengembangan jalan tol," jelas Ari kepada KONTAN, Minggu (10/2).

Sebagai BUMN, menurut Ari, Hutama Karya memiliki kapasitas mengemban tugas dari pemerintah tersebut. Salah yang telah dilakukan adalah membuat kajian dan uji kelayakan tentang jalan tol.

Tapi, sebelum menjadi BUMN jalan tol, Ari bilang, Hutama Karya masih menunggu tiga instrumen hukum, yakni perubahan PP 15/ 2005, serta dua Perpres soal tentang penunjukan dan Penambahan Modal Negara (PMN).

Sekadar informasi, sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengusulkan Hutama Karya bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan jalan tol.

Langkah ini menjadi solusi untuk mendorong keterlibatan pemerintah menggarap jalan tol. Maklum, selama ini, proyek jalan tol selalu dikelola perusahaan yang khusus menangani jalan tol, dan porsi saham pemerintah terbatas. Misalnya, PT Jasa Marga dan PT Adhi Karya. Karena status ini, pemerintah tidak bisa memaksakan setiap proyek pembangunan jalan tol bisa digarap dua perusahaan itu lantaran selalu ada hitungan bisnis.

Padahal, pemerintah ingin membangun banyak jalan tol untuk pembangunan wilayah, meskipun secara bisnis tidak menguntungkan.

Fahriyadi